

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan metode penyelesaian sengketa yang banyak diminati oleh pihak bersengketa, terutama para pelaku usaha bisnis. Dasar hukum ADR di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. ADR dianggap sejalan dengan prinsip para pelaku bisnis yang mengedepankan prinsip cepat, efisien, dan bersifat rahasia. Lebih lanjut sebagai revolusi hukum dari UU AAPS dan perkembangan teknologi, muncul penyelesaian sengketa yang dilakukan secara *online*. Penyelesaian sengketa secara *online* melibatkan pihak keempat, yaitu teknologi yang digunakan.

Walaupun ODR sudah dilaksanakan, akan tetapi sampai saat ini belum ada pengaturan khusus. Peraturan terkait ODR masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan dan bersifat sektoral. Pengaturan ODR dibutuhkan mengingat ketika menyelenggarakan ODR melibatkan teknologi sebagai pihak keempat, dimana terdapat kemungkinan kebocoran data pribadi para pihak. Data pribadi harus dilindungi karena merupakan suatu hasil bentukan dari irisan penggabungan hak atas informasi dan hak atas privasi. Hak tersebut bagian dari hak konstitusi yang diakui dan dijamin perlindungannya oleh negara.

Pemerintah sudah mengesahkan pengaturan perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. UU PDP dianggap cukup komprehensi karena mencakup pengaturan mengenai definisi data pribadi, klasifikasi data, pemrosesan data, pengendali data, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini

mengatur terkait penyelenggaraan mediasi secara elektronik. Selain itu Perma ini juga mengatur kerahasiaan proses mediasi serta dokumen elektronik pada proses mediasi yang terdiri dari data pribadi para pihak yang wajib dijaga dan dilindungi kerahasiaannya. Saat ini data bisa dikatakan suatu aset atau komoditi yang bernilai ekonomi tinggi, karena dibutuhkan pada hampir setiap aspek kehidupan. Sudah banyak kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di beberapa platform. Pada mekanisme ODR, data dikumpulkan dan diproses oleh suatu platform, disinilah peluang kebocoran terjadi padahal mekanisme ODR bersifat rahasia. Oleh karena itu diperlukan pengaturan lebih lanjut dan khusus mengenai sistem ODR yang telah disesuaikan dengan ketentuan sistem hukum nasional Indonesia, agar mampu melindungi dan menjamin kerahasiaan dan keamanan data pribadi, juga memberikan manfaat yang tinggi bagi penyelesaian sengketa di Indonesia.

IV.2 Saran

Di samping kelebihan dan peluang pengembangan dan implementasi ODR di Indonesia, diperlukan peran dari berbagai pihak agar penyelenggaraan ODR di Indonesia berjalan baik. Para pihak dalam penyelenggaraan ODR harus mengakomodasi penerapan ODR dan melakukan kontrol terhadap penyelesaian sengketa melalui ODR tersebut, dari proses hingga putusan.¹³⁴ Diperlukan penguatan pengaturan lebih lanjut dan khusus mengenai ODR, platform ODR, penilaian platform ODR, pihak-pihak yang terlibat dalam ODR, tata cara berperkara melalui ODR, basis data ODR, dan aspek kerahasiaan dan perlindungan data dalam ODR.¹³⁵

¹³⁴ Pujiono, Sulistianingsih, D., Penggunaan Online Dispute Resolution Pada Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Di Indonesia, *Hukum Politik dalam Berbagai Perspektif*, 1 (1), diakses melalui <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.105.105> pada 28 Juli 2023.

¹³⁵ Tanaya, Penerapan Online Dispute Resolution pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Elektronik, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Depok, Juni 2023, diakses pada 28 Juli 2023.

ODR dalam penerapannya dapat menggunakan AI dalam menetapkan putusan yang bersifat *condemtoir*, resolusi, rekomendasi bahkan dimungkinkan berkarakter eksekutorial,¹³⁶ juga untuk penyelesaian sengketa efisien, memberikan kepastian hukum lintas geografi, bahasa, dan yurisdiksi hukum yang berbeda. Jumlah provider jasa yang menawarkan penyelesaian sengketa berbasis online harus diikuti dengan jaminan kepastian hukum atas eksistensi lembaga tersebut. Pengelola adminduk pun tidak luput dari pengaturan mengenai perlindungan privasi dan data pribadi. Setiap penduduk berhak untuk memperoleh perlindungan atas privasi dan data pribadi serta ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.¹³⁷

¹³⁶ Armansyah, Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Transaksi Digital, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diakses pada 26 Juli 2023.

¹³⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diakses pada 31 Juli 2023.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Pada Pasal 6 angka 1 sampai 5 Peraturan & Prosedur Arbitrase BANI

Pasal 1 angka 1 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK 61/2020).

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 14 angka (2) Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia 2022.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pasal 2 Kesepakatan Arbitrase, Buku Saku BANI Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2022

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diakses pada 31 Juli 2023.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 34 ayat (5) UNCITRAL Arbitration Rules 1976

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 4 Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 01 tentang Peraturan dan Acara Mediasi.

Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penjelasan Pasal 3 huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Buku

Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 4, diakses pada 17 16 Juli 2023.

Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, PT Alumni, 2013.

Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.

Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase, Malang: Intrans Pbulishing, 2018.

Huala Adolf, Arbitrase Negara-Negara ASEAN, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, 2009.

Huala Adolf, Dasar-Dasar, Prinsip, dan Filosofi Arbitrase, Kemi Media, Bandung, 2014.

M. Arsyad Sanusi, Teknologi Informasi dan Hukum E-commerce, PT. Dian Ariesta, Jakarta, 2004.

Nurmaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Raymonds Wacks, Personal Information, Privacy and the Law, Oxford: Clarendon, 1989.

Jurnal

Meline Gerarita S., M. Syaifuddin, Annalisa Yahanan, Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia, MM Ilmu Hukum Univ. Sriwijaya, Palembang, 2016, hlm. 89.

- Eman Suparman, Diakses melalui jurnal Sarah Meilita Indrani, Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia (Studi Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta), Fakultas Hukum Univ. Sebelas Maret, 2017, hlm. 35.
- Armansyah, Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Transaksi Digital, Fakultas Hukum Univ. Pancasila, Desember 2021, hlm. 39.
- Purwanto, Efektifitas Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) Pada Penyelesaian Sengketa Bisnis Asuransi Di Indonesia, Dosen Fak. Hukum Univ. Mulawarman, Risalah Hukum, Edisi Nomor 1, Juni 2005, hlm. 6 <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/103/55>.
- Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan), Proyek Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2000, hlm. 24, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/36.pdf>
- Syafrida, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah," Jurnal Sosial Budaya Syar'i, Jakarta, 2020, hlm. 16.
- Pudjo Utomo, Arum Widiastuti, Hetiyasari, Online Dispute Resolution untuk Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Konsumen, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No. 2 November 2021, hlm. 128.
- Pujiono dan Dewi Sulistianingsih, Bab III Penggunaan Online Dispute Resolution (ODR) Pada Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Di Indonesia, hlm. 52-55.
- Rifkin Janet Katsh, Online Dispute Resolution: Resolving Conflict in Cyberspace (Jossey Bass 2001) hlm. 93-116.
- Eliezer Nathaniel, Aspek Perlindungan Hukum Internasional Data Pribadi Pengguna Layanan Jejaring Sosial dan Kewajiban Korporasi Penyedia Layanan, Fakultas Hukum Univ. Udayana, Bali (Richards, Neil dan Hartzog, Woodrow).
- Ananthia Ayu D., Titis Anindyajati, Abdul Ghoffar, Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi), 2019, hlm. 9.

- Muhammad Faiz Aziz, Muhammad Arif Hidayah, *Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce*, STH Indonesia Jentera, Jakarta 2020, diakses pada 23 Mei 2023.
- Pujiono, Dewi Sulistianingsih, *Penggunaan Online Dispute Resolution (ODR) Pada Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di Indonesia*, Studi Ilmu Hukum, Univ. Negeri Semarang, hlm. 51, diakses pada 25 Mei 2023.
- Nanik Sutarni, *Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik Ditinjau Dari Teori Economic Analysis of Law*, Fakultas Hukum Univ. Boyolali, hlm. 165.
- Syafira Agata Ramadhani, *Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia dan Uni Eropa (Comparison of Personal Data Protection Regulation in Indonesia and The European Union)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2021, hlm. 72, diakses pada 7 Juli 2023.
- Endang Wahyati Yustina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi dan Kesehatan*, Tele-Simposium Hukum Kesehatan MHKI, 18 Agustus 2020, diakses pada 19 Juli 2023.
- Nurmala Sari, *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum*, Jurnal Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Indonesia, Agustus 2021, bagian pembahasan poin 1.b., diakses melalui <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/1414/868> pada 11 Juli 2023.
- Wahyu Ahmad Dairobi, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020, hlm. 8, diakses melalui <https://repository.uir.ac.id/9721/1/161010265.pdf> pada 19 Juli 2023.
- Siti Chadijah, *Problematika Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan (Studi Kasus: PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan PT Bumigas Energi)* Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, 2019, hlm. 480, diakses melalui <https://jdihn.go.id/files/414/Problematika%20Pembatalan%20Putusan%20Arbitrase%20Oleh%20Pengadilan.pdf> pada 17 Juli 2023.
- Abdul Hakim Barkatullah, *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internaional Menurut UU Nomor 11*

- Tahun 2008, *Jurnal Hkum Bisnis*, Bol. 19, No. 1, 2010, hlm. 57, diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/30536/10/Skripsi%20Tanpa%20Pembahasan.pdf> pada 17 Juli 2023.
- Scott Brown, Christine Cervenak, and David Fairman. (n.d). *Alternative Dispute Resolution Practitioners Guide*. Conflict Management Group (CMG), hlm. 30, diakses pada 17 Juli 2023.
- Agung Sujati Winata, *Ketidakpastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase Internasional Di Indonesia*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia, 30 Januari 2023, hlm. 94, diakses pada 16 Juli 2023.
- Richard, Neil dan Hartzog, Woodrow, *Taking Trust Seriously in Privacy Law*, *Stanford Technology Law Review*, Vol 19:431 (2016): 434.
- Agvirta Armilia Sativa, Agus Anwar, *Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional Terhadap Pemerintah Indoensia, Teknis Substantif Bidang Pelayanan Otoritas Pusat dan Hukum Internasional*, Badan Pengembangan Sumber Daya Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020, hm. 20, diakses melalui https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/35_Penanganan-Gugatan-Arbitrase_DITJEN-AHU.pdf pada 22 Juli 2023.
- Pujiono, Dewi Sulistianingsih, *BAB III. Penggunaan Online Dispute Resolution (ODR) Pada Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di Indoensia*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, hlm. 47, diakses pada 17 Juli 2023.
- Vizta Dana Iswara, Nur Hadiyati, *Analisis Pentingnya Implementasi Penyelesaian Sengketa Online di Indonesia*, Universitas Internasional Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, Juni 2021, hlm. 16, diakses pada 17 Juli 2023.
- Ni Luh Kadek D. F. F., I Nyoman Putu B., Ni Made Spasutari U., *Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia, 2020, hlm. 174, diakses pada 17 Juli 2023. Diakses melalui http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/odr/2016Technical_notes.html, pada 17 Juli 2023.

- Asia-Pacific Economic Cooperation, 2019, APEC Collaborative Framework for Online Dispute Resolution of Cross Border Business to Business Dispute-Endorsed, Puerto Varas, hlm. 2, diakses pada 17 Juli 2023.
- Heuvel, E.V-den, Online Dispute Resolution as a Solution to Cross-Border e-Disputes: An Introduction to ODR. E. Katsg in Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perpektif Jilid 1 “Law in a Digital World”. The Data Highway of Health or Commerce or Education Can Be the Source of As Much Litigation As the Paved Highways of the Physical World. Diakses pada 22 Juli 2023.
- elikas Petrauskas, Egle Kbartiene, Online Dispute Resolution in Consumer Disputes, Jurisprudence, Mykolas Romeris University, 2011, hlm. 5, diakses pada 18 Juli 2023.
- Pujiono, Dewi Sulistianingsih, Penggunaan Online Dispute Resolution (ODR) Pada Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di Indonesia, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, hlm. 55, diakses pada 21 Juli 2023.
- Bakhramova M., Online Dispute Resolution: Digitalized Disputes and Their Legal Basis Journal of Ethics and Diversity in International Communication, 4017 (c), pp. 25-29, diakses pada 21 Juli 2023.
- Ebner N., John Z., Fairness, Trust, and Security in Online Dispute Resolution, Hamline University’s School of Law’s, Journal of Public Law and Policy, hlm. 36 (2), diakses pada 21 Juli 2023.
- Adel Chandra, Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan Dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, Fakultas Hukum Komputer Universitas Esa Unggul, Jakarta, hlm. 86, diakses melalui <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-3653-adel-chandra.pdf> pada 15 Agustus 2023.
- Riyadus Solikhin, Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia, Padjajaran Law Review, Volume 11, Nomor 1, 2023, hlm. 73 diakses pada 31 Juli 2023.
- Adel Chandra, Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan Dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul, Jakarta, hlm. 87,

diakses melalui <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-3653-adel-chandra.pdf> pada 14 Agustus 2023.

Pujiono, Sulistianingsih, D., Penggunaan Online Dispute Resolution Pada Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Di Indonesia, *Hukum Politik dalam Berbagai Perspektif*, 1 (1), diakses melalui <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.105.105> pada 28 Juli 2023.

Tanaya, Penerapan Online Dispute Resolution pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Elektronik, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Depok, Juni 2023, diakses pada 28 Juli 2023.

Armansyah, Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Transaksi Digital, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, diakses pada 26 Juli 2023.

Berita

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, Arbitrase Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Pasca-pandemi, artikel Kompas 15 Desember 2022, diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2022/12/05/090000926/arbitrase-solusi-penyelesaian-sengketa-bisnis-pasca-pandemi?page=3> pada 20 Mei 2023.

Rifqani Nur Fauziah Hanif, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Desember, 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> pada 20 Mei 2023

Intan Nirmala Sari, IdeA Prediksi Transaksi E-Commerce 2023 Mencapai Rp 700 Triliun, artikel 23 Januari 2023, diakses melalui [IdeA Prediksi Transaksi E-Commerce 2023 Mencapai Rp 700 Triliun - E-commerce Katadata.co.id](https://www.katadata.co.id) pada 23 Juni 2023.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Akselerasi Ekonomi Digital pada e-Commerce dan Online Travel Menjadi Salah Satu Strategi Efektif Mendorong Kinerja Perekonomian Nasional,” dalam siaran pers HM.4.6/179/SET.M.EKON.3/4/2022, 1 April 2022, diakses pada 23 Mei 2023 melalui tautan <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3978/akselerasi-ekonomi-digital-pada-e-commerce-dan-online-travel-menjadi-salah-satu-strategi-efektif-mendorong-kinerja-perekonomian-nasional>.

Badan Arbitrase Tangani Banyak Kasus di Sektor Konstruksi Sejak 2014, Dimas Jarot Bayu, 28 Maret 2019, diakses pada 23 Mei 2023 melalui

<https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a551329a0e/badan-arbitrase-tangani-banyak-kasus-di-sektor-konstruksi-sejak-2014>

CR-27, Arbitrase Online Cara Baru Penyelesaian Sengketa di Tengah Pandemi, artikel 30 November 2021, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/arbitrase-online-cara-baru-penyelesaian-sengketa-di-tengah-pandemi-lt61a600fcb9195?page=2> pada 23 Juni 2023.

Digitalisasi dan Akses Konsumen terhadap Keadilan di Indonesia: Online Dispute Resolution, jurnal PSHK 17 Juni 2021, diakses pada 23 mei 2023 melalui <https://pshk.or.id/aktivitas/lawmetric-digitalisasi-dan-akses-konsumen-terhadap-keadilan-di-indonesia-online-dispute-resolution/>.

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Perkembangan Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia file:///C:/Users/User/Downloads/PSHK_Paparan_Diskusi-ODR_Kemendag.pdf, diakses pada 23 Mei 2023.

Mochamad Januar Rizki, Mendorong Penerapan ODR dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce, artikel Hukumonline 16 Juni 2021, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-penerapan-odr-dalam-penyelesaian-sengketa-konsumen-e-commerce-lt60c9b9f2b560a?page=all> pada 23 Mei 2023.

Kania Rahma Nureda, Penyelesaian Sengketa Secara Online di Indonesia, artikel Hukumonline 7 Juni 2017, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-secara-online-di-indonesia-oleh--kania-rahma-nureda-lt593793b7764b1> pada 23 Mei 2023.

Tirto.id, Perlindungan Data Pribadi: Ketika UU PDP Berpotensi jadi Pasal Karet dan Ancam Kebebasan Pers, 22 September 2022, diakses melalui <https://tirto.id/ketika-uu-pdp-berpotensi-jadi-pasal-karet-ancam-kebebasan-pers-gwsK> pada 31 Mei 2023.

ELSAM: Ada Pasal Karet dalam UU PDP, Berpotensi Mengkriminalisasi Seseorang, 20 Oktober 2022, Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/14570901/elsam-ada-pasal-karet-dalam-uu-pdp-berpotensi-mengkriminalisasi-seseorang> pada 30 Mei 2023.

- Mediana, Keminfo Bersama BSSN Selidiki Insiden Kebocoran Data Pribadi BSI, 16 Mei 2023, diakses melalui https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/16/kominfo-akan-koordinasi-bssn-mendalami-insiden-kebocoran-data-pribadi-bsi?status=sukses_login&status_login=login pada 07 Juni 2023
- Danrivanto Budhijanto, Data As New Oil dalam Konstruksi Hukum Ekonomi Digital di Indonesia, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/> pada 11 Juli 2023.
- Branscomb, Information is the Lifeblood that sustain political, social and business decision, dalam Anne W. Branscomb, Global Governance of Global Networks: “A survey of Transborder Data Flows in Transition”, Vanderbilt Law Review, Vol. 36, 1983, hlm. 985. Bisa dilihat juga dari data yang diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media
- Rofiq Hidayat, Tantangan Implementasi UU PDP, artikel Hukumonline 21 September 2022, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-implementasi-uu-pdp-lt632a9b0f04094/?page=3> pada 10 Juli 2023.
- Ron, Poin Penting Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi, artikel 14 April 2022, diakses melalui <https://sarolangunkab.go.id/utama/baca-berita-414-poin-penting-dalam-ruu-perlindungan-data-pribadi.html> pada 11 Juli 2023.
- Rahka Susanto, Sah! Indonesia memiliki UU Perlindungan Data Pribadi, artikel 20 September 2022, diakses melalui <https://www.dw.com/id/sah-indonesia-miliki-uu-perlindungan-data-pribadi/a-63177829> pada 7 Juli 2023.
- Vika Azkiya Dihni, Kasus Kebocoran Data di Indonesia Melonjak 143% pada Kuartal II 2022, 09 Agustus 2022, diakses melalui <kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022> pada 11 Juli 2023.
- Admin Aptika, Kominfo Gerak Cepat Tangani Lima Kasus Baru Kebocoran Data, artikel 24 November 2022, diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2022/11/kominfo-gerak-cepat-tangani-lima-kasus-baru-kebocoran-data/> pada 11 Juli 2023.
- 10 Kasus Kebocoran Data 2022: Bjorka Dominan, Ramai-ramai Bantah, artikel CNN Indonesia, diakses melalui

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221230125430-192-894094/10-kasus-kebocoran-data-2022-bjorka-dominan-ramai-ramai-bantah/1> pada 8 Juli 2023.

Dian Erika Nugraheny, Menkominfo: Kebocoran Data Pribadi Terjadi Setiap Detik, artikel Kompas 26 Agustus 2023, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/26/06561301/menkominfo-kebocoran-data-pribadi-terjadi-setiap-detik> pada 17 Juli 2023.

4 Kasus Kebocoran Data di Semester I 2023, Mayoritas Dibantah, artikel CNN Indonesia 20 Juli 2023 diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230720060802-192-975421/4-kasus-kebocoran-data-di-semester-i-2023-mayoritas-dibantah> pada 21 Juli 2023.

Ransomware Diduga Sebab Bocornya Data Nasabah BSI, diakses melalui <https://www.dw.com/id/data-nasabah-bsi-diduga-bocor-karena-ransomware/a-65612084> pada 14 Agustus 2023.

Amelia Yesidora, Rekor Buruk Penanganan Kebocoran Data BSI, Salah di Mana? 19 Mei 2023, diakses melalui <https://katadata.co.id/sortatobing/indepth/646766c9b9dfe/rekor-buruk-penanganan-kebocoran-data-bsi-salah-di-mana> pada 14 Agustus 2023.

Shilvina Widi, Deret Kasus Kebocoran Data RI pada 2023, dari BSI hingga Paspor artikel 6 Juli 2023, diakses melalui <https://dataindonesia.id/internet/detail/deret-kasus-kebocoran-data-ri-pada-2023-dari-bsi-hingga-paspor> pada 14 Agustus 2023.

Artikel BBC 7 Juli 2023, Sebanyak 34juta data pemegang paspor Indonesia diduga ‘bocor’ - ‘Rakyat yang menderita, pemerintah paling dapat malu’, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9e7e9grjmko> pada 14 Agustus 2023.

Friska Yolanda, Dirjen Imigrasi: Kasus Kebocoran Data Paspor Terjadi pada Januari 2022, artikel Republika 18 Juli 2023, diakses melalui <https://news.republika.co.id/berita/rxzbp9370/dirjen-imigrasi-kasus-kebocoran-data-paspor-terjadi-pada-januari-2022> pada 14 Agustus 2023.

35 Kebocoran Data 2023, Kominfo Akui Cuma Beri Rekomendasi dan Teguran, artikel CNN Indonesia 19 Juni 2023, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230619141948-192-963776/35->

kebocoran-data-2023-kominfo-akui-cuma-beri-rekomendasi-dan-teguran pada 21 Juli 2023.

Katsh, E. Rifkin, *Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace*. San Fransisco: Jossey Bass, 2001, hlm. 9, diakses melalui https://www.afia.co.id/the-implementation-of-online-dispute-resolution-in-indonesia/#_ftn4 pada 17 Juli 2023.

Standards International Council For Online Dispute Resolution (ICODR), diakses melalui <https://icodr.org/standards/> pada 4 Agustus 2023.

Bambang Pratama, *Perspektif UU-ITE Dalam Perlindungan Data Pribadi dan Kebutuhan Pengaturannya*, September 2020, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2020/09/25/perspektif-uu-ite-dalam-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangannya/> pada 11 Juli 2023.

Mochamad Januar Rizki, *Mengenal Pokok-pokok Aturan Baru PP PSTE*, artikel Hukumonline 3 Desember 2019, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-pokok-pokok-aturan-baru-pp-pste-lt5de653d86d627/?page=1> pada 14 Agustus 2023.

Artikel “Concern Perlindungan Data, Dirjen Dukcapil Ajak Masyarakat Tidak Mudah Publikasikan Data Pribadi, 07 Agustus 2021, diakses melalui <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/806/concern-perlindungan-data-dirjen-dukcapil-ajak-masyarakat-tidak-mudah-publikasikan-data-pribadi> pada 17 Juli 2023.

Fitri Novia Heriani, *Melihat Potensi Penyelesaian Sengketa Arbitrase Secara Elektronik di Indonesia*, artikel Hukumonline 24 Februari 2021, diakses melalui [melihat-potensi-penyelesaian-sengketa-arbitrase-secara-elektronik-di-indonesia-lt6035bac90dd31](https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-potensi-penyelesaian-sengketa-arbitrase-secara-elektronik-di-indonesia-lt6035bac90dd31) pada 18 Juli 2023.

Muhamad Dzadit Taqwa, Anangga W. Roosdiono, *Badan Arbitrase, Proses Arbitrase, dan Pengadilan Negeri: Sebuah Distingsi*, Humas FHUI, diakses melalui <https://law.ui.ac.id/badan-arbitrase-proses-arbitrase-dan-pengadilan-negeri-sebuah-distingsi-oleh-muhamad-dzadit-taqwa-dan-anangga-w-roosdiono/> pada 20 Juli 2023.

Prinsip-Prinsip Umum Arbitras, diakses melalui https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F159760%2Fmod_resource%2Fcontent%2F24%2FAlternatif-Penyelesaian-Sengketa-P4.pdf pada 17 Juli 2023.

Humas UI, Badan Arbitrase, Proses Arbitrase, dan Pengadilan Negeri: Sebuah Distingsi Oleh Muhamad Dzadit Taqwa dan Anangga W. Roosdiono, artikel <https://law.ui.ac.id/badan-arbitrase-proses-arbitrase-dan-pengadilan-negeri-sebuah-distingsi-oleh-muhamad-dzadit-taqwa-dan-anangga-w-roosdiono/> diakses pada 29 Juli 2023.

Bastyo Arsa, Sistem Informasi Desa, Data Kependudukan, dan UU Perlindungan Data Pribadi artikel <https://kumparan.com/bastyodrive/sistem-informasi-desa-data-kependudukan-dan-uu-perlindungan-data-pribadi-1z39uErYR6V/1> 14 Oktober 2022, diakses pada 16 Juli 2023.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), Artikel <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx> diakses pada 9 Agustus 2023.